



Buletin

# Parlementaria



## Layanan Transportasi Saat Nataru Harus Lebih Baik



3 Sistem Peringatan Dini untuk Antisipasi Bencana Alam



18 Awasi Ketat Rantai Distribusi Kebutuhan Pangan Pokok Jelang Nataru

Nomor 1276/II/XII/2023 • Desember 2023



9 772614 339005



# Layanan Transportasi Saat Nataru Harus Lebih Baik

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw mendesak

agar Pemerintah, khususnya beberapa kementerian yang bertugas menjadi operator transportasi, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam rangka Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

"Kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini dari Kementerian PUPR dan juga Dirjen Perhubungan sudah cukup baik dalam mempersiapkannya. Akan tetapi Komisi V selalu menekankan agar pelayanan kepada masyarakat tiap tahun itu (harus) dapat lebih baik ke depan," tandas Robert Rouw saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/12).

Ia mengatakan, Komisi V juga meminta kepada pemerintah agar bagaimana operator - operator tersebut bisa menekan persoalan harga tiket ini. Supaya masyarakat yang ingin melakukan silaturahmi ke daerah, baik pulang kampung dan sebagainya, tidak merasa

”

**KITA JUGA MEMINTA KEPADA ANGGKUTAN KERETA API AGAR TIDAK LAGI SEPERTI TAHUN LALU. JADI HARUS ADA PENINGKATAN SETIAP TAHUN.**



FOTO:DEP/RDT

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau layanan transportasi jelang nataru, Rabu (6/12/2023).

terbebani oleh harga tiket, utamanya tiket pesawat terbang.

"Kita juga meminta kepada angkutan kereta api agar tidak lagi seperti tahun lalu. Jadi harus ada peningkatan setiap tahun. Ini yang paling penting. Kalau begitu terus berarti tidak ada peningkatan. Harus ada perbaikan. Apa yang tahun kemarin menjadi kendala maka tahun ini tidak boleh terjadi lagi. Harus bisa diantisipasi seperti itu," tegasnya.

Dikatakannya, Komisi V juga meminta kepada BMKG untuk dapat lebih banyak memberikan informasi-informasi lebih dini kepada

operator-operator transportasi terkait kondisi cuaca. Sehingga, kepada operator tersebut, Komisi V mengimbau agar dapat menaati informasi yang telah dikabarkan oleh BMKG itu.

"Tadi saya sudah minta supaya tidak lagi laporan itu dengan (bentuk) diagram -diagram dan semacamnya. Yang kami ingin tahu, tahap persiapannya sudah seperti apa, adakah peningkatan yang signifikan dan bagaimana mengatasi peningkatan jumlah penumpang. Jangan sampai ada penumpang yang tercecer nantinya. Ini harus bisa diantisipasi," ujarnya. **dep/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sistem Peringatan Dini untuk Antisipasi Bencana Alam

**K**etua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menyempurnakan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana alam. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dengan sistem peringatan dini guna melindungi keselamatan masyarakat.

"Dalam menghadapi potensi bencana alam, penting sekali untuk merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi demi menghindari jatuhnya korban jiwa," ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (6/12).

Seperti diketahui, Gunung Marapi di Sumatera Barat tiba-tiba mengalami erupsi pada Minggu

(3/12) sore yang menyebabkan 75 pendaki terjebak. Hingga kini proses pencarian dan evakuasi pendaki masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Kurangnya sistem peringatan dini bencana alam bukan hanya terjadi pada erupsi Gunung Marapi, namun juga banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut).

Menanggapi bencana alam di berbagai daerah dengan kurangnya sistem peringatan dini, Puan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan data potensi bencana alam. **pun/aha**

**KETUA DPR RI  
DR. (H.C) PUAN MAHARANI.**



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO:GER/PDT



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Baryah, Prima Danutirta, A.Md,  
Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh  
Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane  
Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianje Meiske Patuli,  
Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu,  
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum  
Alaydrus, Bunga Leonaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju  
Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD,  
Moempoeni, Azka Restu Afhdillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick  
Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Slahean, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M.  
Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri  
Restu Widyawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani,  
Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa  
Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifq Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Ria Damayanti

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhat Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# DPR Tetapkan 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028



Pimpinan DPR RI saat foto bersama dengan 9 (sembilan) Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

FOTO: AFR/PDI

**P**impinan DPR RI dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 menetapkan 9 (sembilan) Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2023-2028. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mewakili Komisi VI menyampaikan harapannya agar Anggota KPPU baru dapat berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab.

"Terhadap 9 (sembilan) Calon Anggota KPPU Periode 2023-2028 terpilih, Komisi VI DPR RI

meminta komitmennya untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan KPPU sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPPU," kata Mohamad Hekal saat membacakan laporan Komisi VI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Kesembilan Anggota KPPU terpilih, diketahui telah melalui pelaksanaan uji kelayakan (*fit and*

*proper test*) dengan Komisi VI pada 14-15 November 2023 lalu, dan berhasil terpilih dari 18 calon yang ada. Proses uji kelayakan Calon Anggota KPPU dilaksanakan secara terbuka dimana masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya yang selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab.

Adapun, 9 (sembilan) Anggota KPPU Periode 2023-2028 yang terpilih adalah; Fanshurullah Asa, Aru Armando, Rhido Jusmadi, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh Noor Rofieq, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso. **bia/aha**



# Rapat Paripurna Setujui 23 Anggota BKPN Periode 2023-2026



Pimpinan DPR RI dalam foto bersama dengan 23 (dua puluh tiga) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) Periode 2023-2026 di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menetapkan 23 (dua puluh tiga) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) Periode 2023-2026. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mewakili Komisi VI menyampaikan harapannya agar Anggota BKPN baru dapat berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab.

"Komisi VI meminta komitmennya untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan BKPN sesuai peraturan perundang-undangan

secara profesional dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas dan independen, dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas BKPN," kata Mohamad Hekal saat membacakan laporan Komisi VI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Anggota BKPN terpilih, diketahui telah melalui pelaksanaan uji kelayakan (*fit and proper test*) dengan Komisi VI pada 29-30 November 2023 lalu. Uji kelayakan dilakukan pada 25 Calon Anggota BKPN dan terpilih 23 Calon Anggota BKPN yang akhirnya ditetapkan. Proses uji kelayakan Calon Anggota BKPN dilaksanakan secara terbuka dimana masing-masing calon menyampaikan visi dan

misinya yang selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab.

Adapun, 23 (dua puluh tiga) Anggota BKPN Periode 2023-2026 diantaranya adalah; Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Heru Sutadi, Lasminingsih, Novriansyah, Ganef Judawati, Haris Munandar Nurhasan, Leonard Victor Hasudungan Tampubolon, Syaiful Ahmar, Syamsul Bahri Siregar, Ferry Firmawan, Fitrah Bukhari, Jailani, Muhammad Mufti Mubarak, Radix Siswo Purwono, Agus Satory, Intan Nur Rahmawanti, Lusiana Dwiyanti, Sudaryatmo, Akmal Budi Yulianto, Aluisius Dwi Rachmanto, Ermanto Fahamsyah, Malona Sri Ri Manurung, N.G.N. Rento Maharaini Kerti.

**bia/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Mari Laksanakan Pemilu yang Riang Gembira dan Cerdas

**K**etua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR RI penutupan masa sidang yang juga memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas pemilu Luber Jurdil serta melaksanakan pemilu dengan riang gembira dan cerdas.

"Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024, mari kita wujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita laksanakan pemilu yang riang gembira dan cerdas," ujarnya dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana semua partai politik peserta pemilu termasuk anggota DPR RI yang juga merupakan anggota daripada partai politik akan memasuki situasi dan kondisi

”

**MARI KITA WUJUDKAN DEMOKRASI YANG MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, TETAP MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN, MARI KITA LAKSANAKAN PEMILU YANG RIANG GEMBIRA DAN CERDAS.**

dinamika politik dalam menghadapi pemilu 2024. Berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat pun akan dilakukan.

"Dalam mengelola dinamika politik tersebut, kita tidak hanya fokus pada mendapatkan kekuasaan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam persatuan dan kesatuan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan semakin memajukan peradaban demokrasi di Indonesia," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Tambahnya, ia pun berharap, walaupun berada dalam tahun politik, anggota DPR RI dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI agar tetap berjalan dengan baik

untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara.

"Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali," tegas Legislator Dapil Jawa Tengah V itu. **gal/aha**



FOTO:DEP/PTD

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Jelang Nataru, Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian

**K**etua DPR RI Puan Maharani mengungkap dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI memperhatikan sejumlah isu salah satunya pengendalian harga kebutuhan pokok. Sebab persoalan kebutuhan pokok menjadi perhatian besar di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, persoalan kenaikan bahan makanan pokok serta tingginya harga dan kelangkaan pupuk yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Kebijakan harga patokan ikan yang terlalu tinggi dibanding harga asli di lapangan, serta kesiapan Pemerintah melalui berbagai upaya agar dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang tahun baru 2024.

"Pemerintah melalui koordinasi bersama TNI dan Polri agar

”

**DPR RI MELALUI ALAT KELENGKAPAN DEWAN TELAH MELAKUKAN RAPAT-RAPAT BERSAMA MITRA KERJA UNTUK MENINDAKLANJUTI PERMASALAHAN TERSEBUT DALAM RANGKA MELINDUNGI RAKYAT, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.**



FOTO: GER/PDT

**Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).**

dapat menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tenang bagi masyarakat saat merayakan hari natal dan tahun baru. Selain itu Pemerintah melalui berbagai upaya agar dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang tahun baru," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Selain itu, adapun isu terkait ketersediaan listrik, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kemudian soal praktek penambangan ilegal di wilayah Papua Barat yang

berada pada kawasan hutan lindung, infrastruktur serta sarana-prasarana pada daerah yang masih mengalami kekurangan dalam sistem jaringan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan terkait Netralitas Aparat Negara pada Pemilu.

"DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam rangka melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, serta menjalankan prinsip *check and balances* terhadap pemerintahan," tandasnya.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Jalankan Fungsi Pengawasan Anggaran, DPR Berhasil Tekan Angka BPIH



FOTO: AFR/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

**D**alam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI melalui Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan sejumlah pengawasan terutama pada pelaksanaan APBN agar berjalan secara efektif, efisien serta akuntabel. Salah satunya terhadap penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

"Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 Hijriah/2024 untuk Jemaah haji regular," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII DPR RI berhasil menetapkan besaran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93.410.286,07 yang kemudian disepakati bersama dengan Kementerian

Agama Republik Indonesia.

Persetujuan Komisi VIII DPR RI atas BPIH tahun 1445 H/2024 M tersebut lebih rendah sebesar Rp11.684.746 dari usulan Menteri Agama yang mengusulkan besaran BPIH sebesar Rp105.095.032. Adapun, saran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93.410.286,07 antara lain yaitu biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114. [gal/aha](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Kembangkan Diplomasi Parlemen, DPR Berhasil Sukses Selenggarakan MIKTA



FOTO: OJI/PDI

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

**D**alam menjalankan diplomasi parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan delegasi DPR RI telah menghadiri berbagai sidang dalam rangkaian penguatan diplomasi untuk mengembangkan peran parlemen di kancah global. Serta telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

"Indonesia juga telah sukses menyelenggarakan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA

yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia pada tanggal 20 November 2023." ujarnya dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Sidang MIKTA Ke-9 dengan tema '*Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges*' telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerja sama konkret antarnegara anggota MIKTA.

Kegiatan Sidang MIKTA Ke-9 di Jakarta juga telah menghasilkan Chair's Statement

yang berisi komitmen parlemen anggota MIKTA guna mendukung terciptanya dunia yang damai bagi generasi sekarang dan mendatang. Parlemen anggota MIKTA juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen berperan aktif dalam tata kelola global abad 21 untuk mencari solusi berbagai tantangan bersama.

Selain kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Australia, serta Italia. Peran diplomasi DPR diharapkan dapat memperkuat posisi politik luar negeri RI bagi kepentingan nasional.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Delapan Fraksi Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023).

**R**apat Paripurna DPR RI pada Selasa, (5/12) mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyebutkan delapan fraksi menyetujui RUU DKJ untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR dengan catatan, sementara PKS menolak.

Sebelum pengesahan tersebut, kedelapan fraksi menyampaikan pandangan fraksi-nya secara tertulis kepada pimpinan DPR. Yakni, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra,

Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PKS yang diwakili Hermanto memilih menyampaikan pandangan fraksi secara lisan. Ada beberapa catatan yang disampaikan Hermanto yang berisi tentang penolakan terhadap RUU DJK.

Pertama, Hermanto menilai pembahasan RUU DKJ terkesan terburu-buru dan rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut. Fraksinya berpendapat bahwa memaksakan pembahasan dalam waktu yang sangat sempit, selain mempertaruhkan

substansi pengaturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang Jakarta.

"Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 dinyatakan bahwa, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga syarat yakni pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan," tuturnya.

Kemudian, kewenangan khusus bidang kebudayaan, dalam pasal 22 ayat (1) huruf b tidak disebutkan adanya sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan, pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Adapun pihaknya menganggap DKI Jakarta masih layak untuk tetap menjadi ibu kota Indonesia. Mereka pun menolak RUU DKJ yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Setelah PKS membacakan pendapatnya, Lodewijk kembali memimpin sidang dan mengambil keputusan.

"Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR?" tanya Lodewijk, yang disambut seruan 'setuju' oleh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. **rnm/aha**



# Pembahasan Revisi UU ITE Utamakan Masukan dari Masyarakat

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayahari mengatakan Komisi I tetap mengutamakan unsur masyarakat dalam proses pembahasan yang ditandai dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para ahli terkait revisi UU ITE.

"Secara keseluruhan, Panja perubahan RUU kedua atas UU ITE, telah menyelenggarakan Rapat Panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas pasal-pasal RUU ITE serta penjelasan umum," ucap Kharis dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Abdul Kharis menambahkan, rapat pengambilan keputusan tingkat I juga disepakati sebanyak 24 perubahan substansi dalam revisi UU ITE. Perubahan itu diatur dalam sejumlah pasal yang turut mengatur ancaman sanksi dan pidana bagi pelanggar undang-undang ini.

"Terhadap seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan pasal per pasal telah dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik serta dilakukan sinkronisasi pasal. Hasil lengkap atas keseluruhan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE sebagaimana telah dipegang oleh kita semua," ungkapnya.

Perubahan UU ITE tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

Ia mengaku, Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memiliki makna yang sangat strategis. Hal itu karena perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

"Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi rasa keadilan, sesuai

dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I tentang perubahan kedua atas RUU ITE pada tanggal 22 November 2023, fraksi-fraksi di Komisi I DPR bersama pemerintah telah menyetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan dan atau pasal sisipan dalam UU ITE. [hal/rdn](#)



FOTODEP/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayahari saat menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU ITE dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/12/2023).

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Jalankan Amanat UU P2SK, Berikut Tujuh Nama Anggota Badan Supervisi LPS

**D**PR RI telah menetapkan 7 (tujuh) nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) periode pertama dengan masa bakti 2023-2028. Pembentukan BS LPS dan penetapan anggota BS LPS merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Berdasarkan ketentuan Pasal 89A ayat (1) dalam Pasal 7 angka 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara saat membacakan laporan tentang hasil pembahasan Calon Anggota BS LPS di Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

”

**BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 89A AYAT (1) DALAM PASAL 7 ANGKA 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK).**

UU P2SK juga mengatur bahwa Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling lambat satu tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan. UU P2SK sendiri disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 12 Januari 2023.

Adapun tujuh nama yang terpilih menjadi Anggota BS LPS periode 2023-2028, yaitu Farid Azhar Nasution, A.P.A. Timo Pangerang, Agung Ardhiyanto, Suhaji Lestiadi, Eko Kusnadi, Tauhid Ahmad, dan Peni Hirjanto. Dijelaskan dalam UU

P2SK bahwa anggota BS LPS terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat dengan jumlah paling sedikit lima orang yang dipimpin oleh satu orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.

uc/rdn



FOTO:DEP/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara saat membacakan laporan tentang hasil pembahasan Calon Anggota BS LPS di Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sembilan Anggota Badan Supervisi OJK di Sidang Paripurna Ditetapkan



FOTO: DEP/IDT

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus foto bersama usai menetapkan sembilan nama anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) periode 2023-2028 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Selasa (5/12/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

**D**PR RI resmi menetapkan sembilan nama anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) periode 2023-2028 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Selasa (5/12) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Nama-nama tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada akhir Oktober silam.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan anggota badan supervisi Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028 tersebut

dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan rapat dilanjutkan dengan pengetukan palu sidang setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara membacakan laporan mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BS OJK periode 2023-2028. Rangkaian pemilihan Anggota BS OJK dimulai pada 9 November 2023 dengan pendaftaran terbuka bagi anggota dari unsur masyarakat yang dilakukan pada 10-20 November 2023. DPR juga melayangkan surat kepada Menteri Keuangan perihal permintaan nama calon dari unsur pemerintah.

"Pada tanggal 27-28 November 2023, Komisi XI DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka uji kelayakan dan uji kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap 40 (empat puluh) Calon Anggota BS OJK di mana terdapat 2 (dua) nama calon yang merupakan usulan dari pemerintah," tutur Amir dalam laporannya.

Adapun sembilan nama yang ditetapkan dalam rapat paripurna tersebut adalah Agustinus Prasetyantoko, Muhammad Edhie Purnawan, Difi Johansyah, Sidharta Utama, Mohammad Jufrin, Hernawan Bekti Sasongko, Didid Noordiatmoko, Tito Sulistio, dan Chandra Fajri Ananda.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pesan Komisi I untuk LPP TVRI dan LPP RRI Hadapi Pemilu 2024

**K**omisi I DPR RI berharap agar LPP TVRI dan LPP RRI tetap menjadi lembaga penyiaran yang mengedepankan netralitas, independensi, adil, seimbang, serta tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11)

RDP tersebut dihadiri oleh Dewan dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI yang membahas Peran LPP RRI dan LPP TVRI menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Komisi I Juga mengapresiasi atas upaya yang dilakukan LPP TVRI dan LPP RRI guna menjamin jurnalisme independen

dan kredibel. Upaya yang dilakukan oleh LPP TVRI dan LPP RRI, antara lain, pertama, penguatan kredibilitas jurnalisme melalui melalui pendidikan wartawan dan uji kompetensi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan dewan pers.

Kedua, melakukan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum tentang sosialisasi dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak. Ketiga, sosialisasi tentang juknis Pemilu dalam pertemuan nasional siaran pemberitaan. Keempat, monitoring secara intensif jurnalisme di satker. Kelima, melibatkan *stakeholders* dalam sosialisasi Pemilu damai. Keenam melakukan berbagai program literasi Pemilu sesuai tahapan Pemilu 2024.

"Sehingga, dapat menghadirkan wajah demokrasi yang damai demi terciptanya kondisi aman tertib nyaman terkendali di tengah masyarakat serta mengajak masyarakat untuk ikut menjaga situasi yang kondusif," ujar Politisi Fraksi PKS itu. — hal/rdn

”

**SEHINGGA, DAPAT MENGHADIRKAN WAJAH DEMOKRASI YANG DAMAI DEMI TERCIPTANYA KONDISI AMAN TERTIB NYAMAN TERKENDALI DI TENGAH MASYARAKAT SERTA MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK IKUT MENJAGA SITUASI YANG KONDUSIF.**

FOTO:ARR/PDT



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Honorer yang Bekerja 5 Tahun Tanpa Putus Harus Diangkat PPPK Tanpa Tes



FOTO:BLF/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN, Medan, Jumat (1/12/2023).

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyayangkan penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara belum direalisasikan secara nyata di lapangan. Padahal telah disepakati bahwa tenaga honorer yang bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini sudah seringkali disampaikan Komisi II DPR kepada Menteri PAN-RB pada rapat-rapat kerja sebelumnya.

"Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga Honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut

tanpa putus wajib diangkat menjadi PPPK, tanpa syarat. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus," ungkap Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN, Medan, Jumat (1/12).

Junimart Girsang menyampaikan bahwa jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan. Jika dilihat dari data yang ada, tenaga honorer di Indonesia jumlahnya memang tidak sedikit, bahkan ditemukan di beberapa instansi di daerah jumlah tenaga honorer lebih banyak daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tersebut diputus dan diberhentikan begitu saja tentu akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius, tingkat pengangguran akan semakin tinggi dan berdampak pada serapan tenaga kerja maupun anggaran.

"Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu, yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10 sampai 20 tahun. Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi II DPR dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam UU tentang ASN yang baru disahkan. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu kita harus segera menyelesaikannya sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks," pungkas Junimart. blf/aha



# Haerudin Ajak Lintas Komisi Bicarakan Komoditas Kratom

**K**omisi IV DPR RI menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Kratom

Indonesia mengenai komoditas Kratom. Komoditas ini merupakan tanaman endemik dari wilayah Kalimantan yang saat ini terkendala permasalahan ekspor karena regulasinya sebagai tanaman obat masih belum jelas.

Pelarangan penggunaan Kratom juga mengacu pada Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna speciosa* (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

"Artinya Komisi IV belum melakukan langkah-langkah strategis mengundang para pihak untuk membicarakan jenis tanaman itu (Kratom) seperti apa posisi payung hukumnya di kita. Karena ada penyakit yang dia harus diobatinya oleh itu," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin dalam audiensi yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Menerima aspirasi daripada Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia, Legislatur Fraksi PAN itu pun menilai Komisi IV perlu melakukan pembicaraan kepada para mitranya yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai *leading sector* daripada permasalahan tanaman Kratom tersebut.

"Jadi nanti diundang para pihak ini, harus duduk bersama, bahkan

kalau sampai tingkat kepentingan yang meluas tentu kita juga undang kepentingan dari bapak-bapak dari perkumpulan pengusaha Kratom. Dan apa langkah yang disepakatinya? apa penelitian ulang atau di bicarakanlah dengan berbagai sektor baik dengan kepolisian atau yang lain, jadi penegakan hukum. Tapi yang pertama itu adalah *leading sector*nya," pintanya.

Selain dengan mitra Komisi IV, ia juga menilai perlu ada pembicaraan dengan Komisi III dan IX karena beberapa persoalan mengenai Kratom ini ada di wilayah mitra Komisi tersebut. Seperti menyangkut dengan BNN mengenai pemberian status legalitas dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan POM yang memiliki wewenang atas regulasi penggunaan obat.

"Nah kita Insyaallah menerima ini pak, akan dibicarakan di masa sidang yang akan datang. Kita akan usulkan minimal di ruang terbatas kemitraan kita, Kementan dan KLHK dulu atau biar lebih mudah, oke kita dengan mitra Komisi III untuk undang BNN, minta Komisi IX untuk mengundang perwakilan Kemenkes sama Badan POM," tandas Legislatur Dapil Jawa Barat XI itu. **gal/aha**



FOTO:ARR/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin dalam audiensi yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Ono Suroño Pertanyakan Anggaran Pupuk Subsidi yang Terus Menurun

**A**nggota Komisi IV DPR RI Ono Suroño mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terus menurunkan anggaran pupuk subsidi, di tengah kelangkaan pupuk di petani. Bahkan, saat ini, pemerintah hanya menganggarkan subsidi pupuk sebesar 7,8 juta ton, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.

"Musim hujan sudah datang, petani sudah mulai melakukan persiapan penanaman. Namun banyak keluhan petani terkait ketersediaan pupuk subsidi yang sulit didapat. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dari tahun ke tahun malah terus menurunkan anggaran pupuk subsidi. Saat ini sekitar 7,8 juta ton atau sepertiga dari seluruh usulan kebutuhan pupuk dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Alhasil petani semakin sulit mendapatkan pupuk urea," ujar Ono dalam Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Pabrik Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30/11).

**”**  
**JIKA TUJUANNYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI, SELAIN MENINGKATKAN PRODUKSI, TAPI KENAPA JUMLAH SUBSIDI YANG TERUS DIKURANGI.**

Terlebih lagi, lanjut Ono, Menteri Pertanian membuat pernyataan bahwa petani yang ingin menebus pupuk subsidi cukup dengan memperlihatkan KTP (kartu tanda penduduk). Hal ini sangat ironi, karena ketersediaan pupuk subsidi di kios yang belum tentu ada. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dan gejolak di masyarakat dan petani, di mana ia kerap mendapat laporan dari petani terkait masalah pupuk.

Menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, sejatinya pupuk subsidi itu tujuan utamanya untuk mengurangi cost dari petani. Masih banyak petani yang belum sejahtera, karena produksinya itu tidak sepadan dengan nilai jual produk

pertanian yang dihasilkan.

"Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan produksi, tapi kenapa jumlah subsidi yang terus dikurangi. Sehingga, pertanyaannya, apakah ini memang niat yang benar-benar tulus dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan produksi, atau tidak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ono juga berharap pemerintah harus terus melakukan perbaikan data. Agar penganggaran untuk subsidi pupuk di tahun berikutnya bisa meningkat. Misalnya dengan data berbasis desa, bukan hanya survei yang dilakukan oleh BPS tapi benar-benar data riil di masyarakat. [ayurdn](#)



FOTO:AYU/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Suroño dalam Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Pabrik Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30/11).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Awasi Ketat Rantai **Distribusi** Kebutuhan Pangan Pokok Jelang Nataru

**A**nggota Komisi VI DPR Muslim mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menindak tegas oknum yang melakukan penumpukan kebutuhan pangan pokok secara ilegal. Pasalnya, jika dibiarkan, rantai distribusi menjadi berbelit, sehingga mengakibatkan harga menjadi melambung tinggi di kalangan masyarakat.

Hal ini menjadi sorotannya lantaran harga kebutuhan pangan pokok terus mengalami tren kenaikan. Padahal, pemerintah menyatakan stok kebutuhan pokok aman dan terkendali jelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

"Saya menduga ada oknum-oknum yang bermain. Di sini, pemerintah harus tindak tegas siapapun yang melakukan penumpukan kebutuhan (pokok). Kalau perlu diproses secara hukum. Jangan coba-coba bermain (agar harga kebutuhan menjadi tinggi). Ingat, ini kebutuhan pokok masyarakat," ucap Muslim di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12).

Tidak hanya soal kebutuhan pangan pokok, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan Pemerintah Indonesia beserta PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengawasan rantai distribusi bahan bakar subsidi secara

menyeluruh. Dirinya tidak ingin masyarakat mengalami krisis energi terutama jelang Nataru 2024.

"Kalau kita cek di lapangan, sangat rawan terjadi penyelewangan solar, apalagi yang subsidi. Ini yang harus diawasi. Kita harap pengawasan semakin diperketat sehingga pemilik pom bensin yang nakal tidak punya kesempatan. Jangan coba main-main, (subsidi) ini hak rakyat," tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Muslim mengusulkan agar lisensi izin pemilik pom bensin dicabut jika terindikasi adanya penyelewangan penyaluran bahan bakar subsidi. Baginya, hukuman ini berpotensi menimbulkan efek jera.

ts/rdn



FOTO: TS/PDT

Anggota Komisi VI DPR Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023).

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Tingkatkan Layanan Penyeberangan di Wilayah Perbatasan

**A**nggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal meminta PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Indonesia Ferry (Persero) untuk memberi perhatian kepada angkutan di pulau-pulau terluar di Indonesia. Ia mengatakan pelayanan angkutan di pulau-pulau terluar di Indonesia saat ini masih sangat kurang.

Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan dan daerah terluar masih membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi untuk berpindah dari satu

daerah ke daerah lainnya. "Saya bulan lalu itu keliling sama PLN ke desa-desa itu, wah itu namanya antri itu harian dari Dumai ke Rupert itu berjam-jam orang menumpuk, karena fasilitasnya kurang, armadanya juga kurang," ungkap Jon Erizal.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran BUMN Transportasi membahas kesiapan BUMN Transportasi dalam menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Untuk itu, ia pun meminta ASDP tidak hanya fokus meningkatkan

pelayanan di wilayah Jawa-Bali saja, namun juga wilayah-wilayah lainnya. "Jadi tolong ini diperhatikan koordinasi sama bupati setempat atau walikota setempat. Di subsidi pun menurut saya kalau memang harus ada PMN di situ itu kan berhasil mengurangi nanti biaya tinggi itu, bayangkan kalau mereka sehari hanya menyeberang 30-40 menit harus (seharusnya) bisa, (sekarang) 2 hari pulang pergi kan biayanya jadi tinggi ongkos angkut. Nah ini tolong diperhatikan," harapnya.

— **bia/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).

FOTO: OJI/PDT

# Komisi VIII Pastikan Alokasi Bansos DIY Tepat Sasaran

**K**omisi VIII DPR RI memastikan bantuan sosial yang dialokasikan Kementerian Sosial ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepat guna dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ia mendorong agar bantuan sosial ini bisa digunakan masyarakat sesuai peruntukannya.

"Beberapa bantuan sosial seperti program keluarga harapan, kartu sembako, asistensi rehabilitasi sosial, kami pastikan agar targetnya sesuai. Jika Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak-anak, tentu harus dibelikan seragam, alat-alat sekolah, perlengkapan sekolah. Jika bantuan tersebut untuk lansia, tentu harus sesuai kebutuhan lansia," urainya usai ditemui di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial



FOTO: DIF/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).



**KAMI PASTIKAN JUMLAH YANG DITERIMA OLEH KPM (KELUARGA PENERIMA MANFAAT) SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA. SEGERA LAPORKAN JIKA ADA DATA YANG TIDAK BENAR, SEGERA SAMPAIKAN AGAR TIDAK MENJADI PERMASALAHAN DIKEMUDIAN HARI.**

(BBPPKS) Regional III, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (6/12).

Lebih lanjut, Ace ingin agar Perangkat Daerah berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan warganya. Terutama masyarakat pra sejahtera yang dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.

"Guna mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan, seluruh Perangkat Daerah harus memiliki Call Center, termasuk Dinas Sosial. Mereka harus berperan dalam hal memperbarui data-data penerima

bantuan sosial, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Ace juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus jujur dan bersinergi. Hal ini menjadi peran Komisi VIII DPR RI dalam mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial di masing-masing wilayahnya. "Kami pastikan jumlah yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai dengan peruntukannya. Segera laporkan jika ada data yang tidak benar, segera sampaikan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari," tutupnya.

**dip/aha**



# Komisi IX Tinjau Komitmen Pemkot pada Layanan Primer Kesehatan Tangerang



FOTO: PUN/PRD

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin Kunsfik Komisi IX DPR RI di Aula Puskesmas Panunggan, Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX melakukan peninjauan fasilitas kesehatan di Kota Tangerang, Banten. Dari peninjauan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menjelaskan pihaknya siap menampung aspirasi dari Kota Tangerang yang ternyata masih membutuhkan perbaikan sarana prasarana, fasilitas alat kesehatan, serta tenaga medis yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di kota tersebut.

"Melalui pertemuan hari ini, kami mendapatkan informasi berharga yang nantinya akan kami bahas dan koordinasikan dengan Kementerian

terkait," ujar Charles saat memimpin Kunsfik Komisi IX DPR RI di Aula Puskesmas Panunggan, Tangerang, Banten, Rabu (29/11).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu menjelaskan Komisi IX DPR RI melalui Kunjungan ini juga ingin mengetahui secara langsung komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat utamanya layanan primer.

"Kita semua ingin mengetahui bagaimana layanan primer di Kota Tangerang ini berjalan dan apa saja tantangannya," tutup Legislator Dapil DKI Jakarta III tersebut. Usai

pertemuan, tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin Charles Honoris melakukan kunjungan lapangan peninjauan Puskesmas Panunggan.

Turut hadir Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo, Dewi Aryani (F-PDI Perjuangan), Ade Rezki Pratama, Sutan Adil Hendra (Fraksi Gerindra), Nurhadi (Fraksi Nasdem), Sukamto (F-PKB), Linda Megawati, Lucy Kurniasari, Hasan Saleh (Fraksi Demokrat), Ansori Siregar (F-PKS), Saleh Partaonan Daulay dan Muhammad Rizal (F-PAN).

pun/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Dukung Pembangunan Infrastruktur Olahraga di Padang Panjang



FOTO: AHA/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat meninjau pembangunan pusat olahraga (sport center) di Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (6/12/2023).

**M**eski tergolong kota kecil, Padang Panjang punya mimpi besar menjadi pusat kegiatan olahraga di Provinsi Sumatera Barat bahkan nasional. Dalam kunjungan kerja reses ke kota ini, Komisi X DPR RI memahami semangat pemerintah daerah (pemda) nya dan berharap pemerintah pusat dapat turut mendukung pembangunan infrastruktur olahraganya.

"Ini kota kecil, namun punya banyak bakat, selain dari bidang pendidikan juga bidang kepemudaan dan olahraganya," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian usai meninjau pembangunan pusat olahraga (*sport center*) di Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (6/12). Sebelum meninjau lokasi tersebut, Komisi X mengadakan

pertemuan dengan pemda terkait dan mendapatkan masukan terhadap rencana pembangunannya.

Saat pertemuan, Pj Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menyebutkan motivasi kotanya membuat pusat olahraga lantaran potensi alam Padang Panjang yang dingin dan segar, sehingga cocok menjadi pusat kegiatan olahraga. Untuk itulah pihaknya tengah membangun gedung sentra olahraga itu di atas tanah 5,7 hektar.

Namun begitu, pemda cukup kesulitan merealisasikannya, apalagi APBD Kota Padang Panjang terbilang kecil dan dana pembangunan berasal dari keuangan daerah ini. "Maka harapan kami, Komisi X dapat mendorong penambahan alokasi DAK infrastruktur bidang keolahragaan di kota ini untuk menuntaskan pembangunan *sport center*," terang Sonny.

Menanggapi hal itu, Hetifah memahami tantangan dana yang kecil turut mempengaruhi realisasi pembangunan pusat olahraga ini. "Tentu kami harap pemerintah pusat mendukung dan memfasilitasi pembangunan ini, agar Padang Panjang bisa mewujudkan potensi dan cita-cita warganya," sebut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dukungan juga diberikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin, yang dalam pertemuan dengan Pemda Padang Panjang mengungkapkan perlunya pengkajian khusus terkait skema pembiayaan pusat olahraga ini. "Mungkin bisa pusat olahraga khusus milik pemerintah pusat ada di Padang Panjang atau milik pemda, namun dibiayai sepenuhnya. Ini perlu kajian khusus, kita (akan) ajukan dan komisi x akan bantu," ungkapnya.

aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pertumbuhan Ekonomi Bali Didukung Kontribusi UMKM

**B**adan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Bali selama triwulan III-2023 tumbuh sebesar 0,30 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan II-2023 (*q-to-q*). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali

**”  
CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI TIDAK TERLEPAS DARI KONTRIBUSI UMKM. ADAPUN BERDASARKAN DATA PEMERINTAH POVINSI BALI, JUMLAH UMKM DI BALI MENINGKAT PESAT SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR.**

triwulan III-2023 tumbuh sebesar 5,35 persen, dimana pertumbuhan tersebut didukung kontribusi UMKM.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat menyampaikan sambutan pembuka pada pertemuan dengan otoritas BI dan para direksi HIMBARA di Denpasar, Bali, Rabu (6/12). UMKM di Bali sendiri, selepas pandemi Covid-19 tumbuh pesat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

“Capaian pertumbuhan ekonomi Bali tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Adapun berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali, jumlah UMKM di Bali meningkat pesat selama lima tahun terakhir. Dari semula, 13.042 UMKM di tahun 2019, kemudian terjadi peningkatan sebanyak 442.848 UMKM pada tahun 2023,” ungkap Amir.

Dari jumlah tersebut, sambung Amir, UMKM di sektor formal sebanyak 107.656 (24,31 persen) dan sektor informal sebanyak 335.192 (75,69 persen). Politikis PPP ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi Bali bila dikaji dari sisi produksi, maka pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri mampu tumbuh sebesar 46,49 persen.

“Jika diakumulasi pertumbuhan triwulan I-2023 sampai dengan triwulan III 2023, maka ekonomi Bali pada triwulan III-2023 tercatat tumbuh sebesar 5,66 persen (*c-to-c*),” urainya lebih lanjut. mh/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat memimpin pertemuan dengan otoritas BI dan para direksi HIMBARA di Denpasar, Bali, Rabu (6/12/2023).

FOTO:MH/PTD



**SEKRETARIS JENDERAL (SEKJEN) DPR RI INDRA ISKANDAR DALAM FOTO BERSAMA PADA ACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-24 DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI. FOTO: FHN/PDT**



**KETUA PIA DPR RI, TRI HATMANTI UTUT ADIANTO BERSAMA ANGGOTA PIA DPR RI LAINNYA USAI MELAKUKAN BAKTI SOSIAL DENGAN MENGUNJUNGI BEBERAPA PANTI ASUHAN DAN PANTI WERDHA DI JAKARTA. FOTO: FHN/PDT**



**PLT. KEPALA PUSAT PUU BIDANG EKUIBANG KESRA BK SETJEN DPR RI, WIWIN SRI RAHYANI, SAAT MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UPI TERKAIT DENGAN DUKUNGAN KEAHLIAN DI BIDANG LEGISLASI KEPADA DPR RI. DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, BANDUNG, JAWA BARAT DI BANDUNG, JAWA BARAT, KAMIS (30/11/2023). FOTO: AIS/PDT**

